

## **ELECTORAL VOLATILITY DALAM PERSPEKTIF KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA : SEBUAH ANALISIS HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN KONSTITUEN**

**Nurlatipah Nasir**

*STISIP Tasikmalaya*

*E-mail: nasir.nurlatifah@gmail.com*

### **Abstract**

*According to Mainwaring, party systems in the third-wave democracies are markedly less institutionalized than those in most long-established democracies, more institutionalized systems are ones in which parties have strong roots in society. After the fall of Soeharto, the political parties in Indonesia facing many problems, especially on the relation between the parties and their constituent. The increasing number of electoral volatility show an instability as caused by the political parties which is weakly institutionalized. Whereas, the institutionalized political parties is generally acknowledged positively correlated with the consolidation of democracy.*

**Keywords:** *Electoral Volatility, Political Party, Consolidation of Democracy*

### **Latar belakang**

Pada seputaran tahun 1700-an, kata demokrasi telah dikenal sekian lama oleh para kalangan teoritis politik dan secara umum dipahami oleh para pendidik sebagai salah satu dari tiga sistem politik Aristoteles (selain sistem aristokrasi dan monarki). Istilah ini muncul dalam abstraksi dan diskusi mengenai sistem politik yang ideal (Markoff, 2002).

Pada perjalanannya, gelombang demokrasi tidak berjalan mulus dan mengalami pasang surut. Pasca Perang Dunia II, tantangan gelombang anti demokrasi muncul dari negara-negara Blok Timur yang dikomandoi Uni Soviet bersama dengan negara-negara satelitnya. Namun, gelombang demokrasi dan demokratisasi telah berubah menjadi “virus” yang cepat menyebar, terutama pada dekade 80-90an. Demokratisasi tersebut melanda berbagai belahan dunia, terutama sekali menerpa tatanan masyarakat negara-negara berkembang dan negara-negara yang otoriter. Uni Soviet sebagai negara kampiun komunis pun

tidak terlepas dari pengaruh tersebut dan mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991.

Jatuhnya rezim Soeharto telah membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, sebuah sistem politik yang sepenuhnya responsive terhadap warga Negara (Dahl, 1971). Menurut Robert Dahl (dikutip oleh Lili Romli; 2008), demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal, yakni : (1) menghindari tirani; (2) menghormati hak-hak asasi; (3) kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan hak; (9) mencari perdamaian; dan (10) kemakmuran. Berdasarkan hasil survey LSI, secara umum mayoritas pemilih Indonesia setuju atau sangat setuju dengan pandangan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik di Indonesia (Mujani, dkk; 2012)

Dalam demokrasi, lembaga partai politik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan menjadi pilar dari demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Namun dalam demokratisasi, sebuah proses demokrasi yang masih mencari bentuk, keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi, tetapi juga demokrasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi pengembangan partai politik itu sendiri. Dalam demokrasi kontemporer, partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik (Sigit Pamungkas, 2011).

Dalam berbagai studi tentang partai politik, terdapat banyak fungsi yang dilekatkan pada partai politik. Miriam Budiharjo (2010) mengungkapkan bahwa, dalam Negara demokrasi partai politik mempunyai fungsi-fungsi, diantaranya sebagai sarana komunikasi politik (fungsi artikulasi dan agregasi), sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik (*conflict management*). Sementara Katz dan Mair (1993) membagi partai politik kedalam tiga wajah, yakni partai politik di *central office*, *public office*, dan partai politik *on the ground* (di basis massa).

Pasca reformasi, perkembangan partai politik di Indonesia mengalami berbagai kendala, partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Selain itu, partai politik juga dianggap korup sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menempati urutan terendah dibandingkan institusi-institusi politik lainnya. Sentimen anti partai ini juga pada akhirnya mengakibatkan hubungan partai dan masyarakat menjadi jauh dan pada akhirnya partai kehilangan legitimasinya. Akibat hal tersebut, kemudian ada yang menyebut partai politik sebagai “*necessary evil*” (setan yang diperlukan). Sebuah paradoks dari keberadaan partai politik yang disatu sisi partai politik dianggap penting dan diperlukan, namun disisi lain keberadaan partai politik ini juga tidak disukai.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh partai politik sebagai akibat dari jauhnya hubungan partai politik dan masyarakat (konstituen) adalah tingginya angka *electoral volatility*. Berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh Golkar, pada Pemilu pasca reformasi selalu menghasilkan partai pemenang yang berbeda. Ketidakstabilan perolehan suara dan cenderung terus mengalami penurunan juga dialami oleh PDIP, PKB, PPP, dan PAN. Bahkan PDIP dan Golkar yang menjadi pemenang di Pemilu-Pemilu sebelumnya harus kalah oleh partai yang relatif baru, yakni Partai Demokrat.

*Electoral volatility* merupakan sebuah fenomena yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Latin (Roberts dan Wibbels, 1999), Eropa Barat (Pederson, 1979), dan di berbagai negara lainnya . Andreas Ufen mengatakan bahwa tingginya angka *electoral volatility* merupakan sebuah indikator dari lemahnya pelebagaan partai. Oleh karena itu cukup menarik untuk mengelaborasi bagaimana relasi *electoral volatility* dengan pelebagaan partai politik di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara partai politik dengan konstituennya.

***Electoral Volatility***

*Electoral volatility* atau agregat perubahan pilihan dari satu partai politik ke partai politik lain, dari satu Pemilu ke Pemilu selanjutnya (Roberts dan Wibbels, 1999) merupakan sebuah fenomena yang banyak dihadapi oleh Negara-negara demokrasi dan Negara semi demokrasi di dunia. Kebanyakan Negara demokrasi dan semi demokrasi di Negara-negara berkembang mempunyai kecenderungan *electoral volatility* yang lebih tinggi dan stabilitas electoral yang lemah daripada di Negara demokrasi industri maju (Mainwaring dan Torcal, 2005). Berdasarkan perhitungan Mainwaring di enam Negara industri maju dengan demokrasi yang sudah mapan rata-rata angka *electoral volatility* mencapai 9,7; 20,5 untuk Negara demokrasi lama di Amerika Latin; 15,7 di tiga Negara Eropa Selatan; 30,00 di delapan Negara Amerika Latin baru dan 35,3 di empat Negara bekas Uni Sovyet. Berikut adalah tabel perhitungan *electoral volatility* yang dibuat oleh Mainwaring dan Zoco (dikutip oleh Andreas Ufen, 2006) termasuk Indonesia.

Tabel 1  
Lower Chamber Electoral Volatility

Country	Time Span	Average Volatility
United States	1944 - 2002	3.3
United Kingdom	1945 - 2001	6.8
Greece	1974 - 2000	10.4
Columbia	1958 - 2002	12.5
Italy	1946 - 2001	15.1
France	1951 - 2002	15.3
Chile	1989 - 2001	16.7
Brazil	1986 - 2002	21.8
Mexico	1988 - 2000	22.7
South Korea	1988 - 2000	24.6
Argentina	1983 - 2001	25.1
India	1951 - 1999	25.5
Indonesia	1999 - 2004	28.5
Venezuela	1958 - 2001	31.4
Thailand	1983 - 2004	35

Philippines	1992 -1998	37.3
Poland	1991 - 2001	46.6

---

Sumber : Allen Hicken “Stuck in The Mud Parties  
and Party Systems in Democratic Southeast Asia

Berdasarkan tabel tersebut, Amerika Serikat sebagai salah satu Negara industry maju dengan kehidupan demokrasi yang sudah mapan, memiliki angka volatilitas yang paling rendah yakni 3.3. Sementara Negara-negara berkembang yang baru memasuki era demokrasi cenderung memiliki angka volatilitas yang cukup tinggi seperti di Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara lainnya serta beberapa Negara di kawasan Amerika latin.

Hal yang menarik dan juga ironis dari dari tabel tersebut adalah bahwa di Asia Tenggara, Indonesia yang tergolong baru memasuki era demokratisasi dibanding Negara-Negara lainnya seperti Thailand dan Filipina mempunyai angka volatilitas yang lebih rendah. Angka *electoral volatility* di Indonesia, yakni 28.5 merupakan 19% lebih rendah dari angka volatilitas di Thailand dan 24% lebih rendah dari angka volatilitas Filipina. Namun, studi terakhir yang mengukur tingkat *electoral volatility* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup besar, yakni menjadi 30.20 (Asep Nurjaman, 2012).

Tingkat *electoral volatility* di Indonesia yang cukup tinggi ditunjukkan oleh pemenang Pemilu yang berbeda-beda dari tiga Pemilu pasca reformasi yang telah dilaksanakan. PDIP yang merupakan pemenang pada Pemilu tahun 1999 terus mengalami penurunan perolehan suara. Demikian halnya dengan Golkar yang menjadi pemenang pada Pemilu Tahun 2004 juga kehilangan suara yang cukup besar pada Pemilu Tahun 2009. Sementara itu trend penurunan perolehan suara yang cukup signifikan juga dialami oleh partai-partai Islam, PPP yang merupakan partai yang sudah hadir sejak masa Orde baru terus mengalami penurunan jumlah suara yang cukup drastis. Berikut adalah tabel tingkat *electoral volatility* di Indonesia dari Pemilu Tahun 1999-2009

Tabel 2  
Indeks Electoral Volatility di Indonesia

Nama Partai	Suara		Net Volatility	Suara	
	1999	2004		2009	Net Volatility
PDIP	33.74	18.31	-15.43	14.03	-4.28
GOLKAR	22.44	21.62	-0.82	14.45	-7.17
PKB	12.61	11.98	-0.63	4.94	-7.04
PPP	10.71	8.16	-2.55	5.32	-2.84
PAN	7.12	6.47	-0.65	6.01	-0.46
PBB	1.94	2.56	0.62	1.79	-0.77
PK/PKS	1.36	7.2	5.84	7.88	0.68
Demokrat		7.46	7.46	20.85	13.39
Hanura				3.77	3.77
Gerindra				4.46	4.46
Partai Lain	10.08	16.24	6.16	24.73	8.49
<i>Total Volatility</i>			28.55		30.2

Sumber : Disertasi Asep Nurjaman “Electoral Volatility Nasional dan Lokal : Studi Tentang Stabilitas Sistem Kepartaian Di Indonesia” (2012)

Dengan membandingkan perbedaan tingkat *electoral volatility* di negara maju dengan negara berkembang, kita dapat melihat perbedaan stabilitas pola kompetisi antar partai di kedua negara tersebut yang secara lebih jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi. Mainwaring (1998) menyebutkan bahwa “*with low volatility, electoral outcomes are stable from one election to the next, lending a high degree of predictability to a crucial aspect of democratic politics*”. Dampak lainnya adalah partai menjadi lebih berumur panjang, dan rakyat tahu apa yang mereka perjuangkan. Selain itu kesempatan munculnya partai baru menjadi tertutup, bukan secara hukum, namun karena rendahnya elektabilitas.

Sebaliknya, masih menurut Mainwaring, tingginya angka volatilitas membawa hasil Pemilu yang kurang stabil. Kondisi ini juga mengakibatkan *market electoral* menjadi lebih terbuka dan tidak dapat diprediksi. Partai-partai besar dapat menderita kehilangan suara yang besar, sementara partai baru atau partai minoritas bisa secara tiba-tiba memperoleh suara yang besar. Pesatnya peningkatan perolehan suara serta jatuhnya partai membuat sistem menjadi lebih buram bagi masyarakat yang memiliki sedikit waktu untuk mencari tahu apa yang membedakan antar kompetitor. Dalam tingkat volatilitas yang tinggi,

kemungkinan perubahan kebijakan cenderung menjadi lebih besar, sebagaimana terjadinya pergantian anggota badan legislatif. Selain itu, lembaga pembuat undang-undang/ hukum dalam sistem dengan volatilitas yang tinggi biasanya kurang memiliki pengalaman politik.

Berdasarkan berbagai studi sebelumnya, banyak hal yang menjadi penyebab tingginya angka *electoral volatility*. Dalam studi Roberts dan Wibbels (1999) tentang sistem partai dan *electoral volatility* di Amerika Latin, mereka menguji tingginya angka *electoral volatility* dari sisi ekonomi, karakter institusi politik rezim dan sistem kepartaian, serta struktur dan organisasi pembilahan sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa *electoral volatility* merupakan sebuah fungsi dari gangguan ekonomi jangka pendek.. kerapuhan institusi baik dari rezim demokratis maupun sistem kepartaian, dan struktur pembilahan (*cleavage*) yang relatif cair. Robert dan Wibbles juga menemukan bahwa perubahan signifikan dalam aturan Pemilu atau perubahan dalam pemerintahan serta usia partai juga mempengaruhi tingkat *electoral volatility*. Dari partai sudut pandang usia partai, partai lama dianggap akan mempunyai akar partai yang lebih mengakar dan lebih stabil daripada partai baru. Namun jika dilihat dari usia partai, partai-partai yang sudah berusia cukup lama di Indonesia justru mempunyai indeks *electoral volatility* yang lebih tinggi.

Sementara Mainwaring memandang adanya korelasi positif antara tinggi rendahnya angka *electoral volatility* dengan usia atau lama tidaknya sebuah sistem menerapkan sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil perhitungan indeks volatilitas berbagai negara, mulai dari negara dengan demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat sampai negara-negara yang baru saja melakukan transisi demokrasi seperti Indonesia (Tabel 1).

Selain faktor-faktor tersebut, adanya ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap partai politik juga merupakan sumber terjadinya *electoral volatility*. Krisis kepercayaan ini merupakan akibat dari ketidakpuasan masyarakat atas kinerja partai politik dalam pemerintahan, pengelolaan organisasi partai, dan partai di akar rumput. Selain itu partai politik juga dianggap identik dengan konflik, *rent seekers*/ kartel, patronase, dan partai juga dianggap identik dengan pragmatisme

kekuasaan. Anggapan-anggapan ini yang pada akhirnya kemudian mengasilkan sikap sentiment anti partai.

Dibanyak negara, berbagai bentuk sentimen anti partai berdampak pada banyak segi seperti kemerosotan partai, baik dalam keanggotaan partai maupun kemampuan partai dalam memobilisasi pemilih ketika Pemilu, volatilitas pemilih yang tinggi serta penurunan identifikasi kepartaian (*party ID*).

Dari pemaparan diatas, penulis melihat bahwa hubungan antara partai politik dengan konstituen (masyarakat) di akar rumput (*grass root*) atau pengakaran partai seperti yang diungkapkan oleh Robert dan Wibbels, serta identifikasi kepartaian sebagai bagian dari institusionalisasi atau pelembagaan partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya *electoral volatility*. Jauhnya hubungan antara partai politik dengan konstituen mengakibatkan pada penurunan *party ID* menunjukkan bahwa partai politik tersebut belum terlembaga, atau dengan kata lain pelembagaan partai politik masih lemah. Tidak adanya kedekatan antara konstituen dengan partai politik kemudian mengakibatkan tidak adanya loyalitas konstituen terhadap sebuah partai politik, dan pada akhirnya sejumlah besar pemilih akan memilih partai yang berbeda pada saat Pemilu. Fenomena yang disebut sebagai *partisan dealignment* ini membawa konsekuensi pada peningkatan *electoral volatility*, *split ticket voting*, dan perubahan pilihan politik.

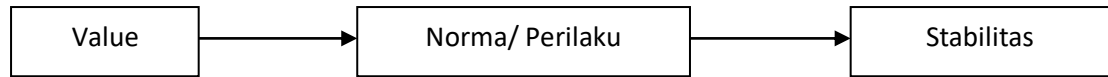
### **Pelembagaan Partai Politik (*Party Institutionalization*)**

Jika dilihat dari perkembangannya, partai politik di Indonesia tampak belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggengan kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang begitu besar, sementara partai politik belum siap dengan kelembagaan yang baik. (Lili Romli, 2012).

Institusionalisasi atau pelembagaan merupakan proses dimana satu set aturan formal dan informal secara terus menerus dan terhubung semakin



membentuk harapan (Ufen, 2007). Sementara menurut Huntington (1968) menyebutkan bahwa institusionalisasi merupakan proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabilitas.



Gambar 1. Pelembagaan Partai Politik. Value mempolakan/ menginternalisasi norma/perilaku dalam organisasi yang pada akhirnya mendorong stabilitas

Sementara menurut Ari Dwipayana (2012), secara sederhana pelembagaan partai modern adalah proses pemantapan partai politik (organisasi maupun individu-individu dalam partai) dalam rangka menciptakan pemolaan perilaku atau sikap atau budaya untuk menghasilkan partai politik yang representative dan mampu menjalankan fungsinya. Pelembagaan partai juga menyangkut bagaimana partai secara internal mampu memberdayakan dirinya agar tetap eksis menjalankan fungsinya. Institusionalisasi diorientasikan untuk terciptanya partai politik yang memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan berkompetisi dengan partai-partai lain.

Dalam literature kepartaian dikenal dua istilah pelembagaan, yakni pelembagaan sistem kepartaian dan pelembagaan partai politik. Mainwaring dan Torcal (2005) secara khusus tidak membedakan dengan jelas perbedaan diantara keduanya, namun pelembagaan sistem kepartaian merujuk pada adanya nilai baku dan stabil pada interaksi diantara partai politik, atau proses dimana sistem kepartaian mendapatkan nilai baku dan stabil. Pelembagaan sistem kepartaian dengan pelembagaan partai politik berkaitan dengan erat. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mainwaring (1998) bahwa ada empat dimensi dalam pelembagaan sistem kepartaian :

- *First, more institutionalized party systems enjoy considerable stability; patterns of party competition manifest regularity.* Sebuah sistem dimana partai besar sering muncul kemudian menghilang atau menjadi partai

minoritas menunjukkan pelebagaan sistem yang lemah, sebagaimana total perolehan suara partai yang berfluktuasi dengan gap yang besar.

- *Second, more institutionalized systems are ones in which parties have strong roots in society.* Ikatan yang mengikat partai dan masyarakat lebih jelas; sebaliknya, partai tidak menstruktur preferensi politik dari waktu ke waktu dan ada keteraturan yang terbatas dalam hal bagaimana orang memilih. Selain itu partai dalam sistem yang sudah terlembaga cenderung lebih konsisten dalam memposisikan ideology mereka. Jika sebuah partai besar merubah posisi relatif ideology mereka, biasanya ini menjadi sinyal lemahnya ikatan diantara partai dengan konstituen dan kurangnya proses regular bagaimana partai berkompetisi dan bagaimana hubungan mereka dengan aktor sosial.
- *Third, in more institutionalized systems, the major political actors accord legitimacy to parties.* Elit dan warga negara pada umumnya percaya pada partai sebagai lembaga yang fundamental, diperlukan, dan diinginkan dalam politik demokratis. Legitimasi adalah dimensi pelebagaan karena konsep yang terakhir menyiratkan bahwa aktor mendasarkan perilaku mereka pada harapan bahwa praktek akan terus berlanjut. Legitimasi memperkuat kecenderungan aktor yang diharapkan untuk melanggengkan pola perilaku.
- *Finally, in more institutionalized systems, party organizations matter.* Partai tidak tunduk pada kepentingan dari para pemimpin yang ambisius, namun memiliki status independen dan nilai mereka sendiri. Pelebagaan akan menjadi terbatas selama partai adalah instrumen pribadi dari seorang pemimpin atau segelintir elit. Sebagaimana pelebagaan berkembang, partai menjadi otonom *vis-'a-vis* individu yang awalnya mungkin telah menciptakan mereka sebagai instrumen belaka. Ini adalah tanda pelebagaan sistem yang lebih besar jika partai telah mengokohkan struktur, jika partai komprehensif secara teritorial, jika partai terorganisasi dengan baik, jika partai telah didefinisikan secara jelas mengenai struktur dan prosedur internal, dan jika partai memiliki

sumber daya mereka sendiri. Dalam sistem yang lebih terlembaga, ada rutinisasi prosedur *intraparty*, termasuk prosedur untuk pemilihan dan perubahan kepemimpinan partai.

Dari empat dimensi tersebut pelebagaan sistem partai sangat erat berkaitan dengan pelebagaan partai itu sendiri. Dan dalam tulisan ini akan lebih memfokuskan pada pelebagaan partai politik terkait dengan *electoral volatility*, untuk melihat faktor-faktor kelembagaan partai politik yang berdampak pada tingginya angka *electoral volatility*.

Dari berbagai studi yang sudah ada, kriteria tentang pelebagaan partai politik menjadi beragam. Berikut akan dibahas mengenai pendekatan-pendekatan pelebagaan partai politik dari studi-studi yang sudah ada sebelumnya.

### 1. Vicky Randall dan Lars Svasand

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), proses pelebagaan partai politik mengandung dua aspek, yakni aspek internal - eksternal, serta structural – cultural. Dan dari kedua aspek tersebut terdapat empat dimensi pelebagaan partai politik yakni *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy* dan *Reification*.

Randall & Svasand (2002) Party Institutionalization		
	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<b>Structural</b>	Systemness	Decisional Autonomy
<b>Attitudinal</b>	Value Infusion	Reification

Tabel 3. Dimensi institusionalisasi partai menurut Randall dan Svasand (2002)

➤ **Systemness**

*Systemness* atau derajat kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD / ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD / ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu. (Ramlan Surbakti, 2003 dikutip oleh Ari Dwipayana; 2012).

Diantara karakteristik partai, Randall dan Svasand menyarankan batasan *systemness* pada hal sebagai berikut : “*The way party originated and grew, its relevant resources and especially funding, the role of individual party leader vs. the party organization as such, the role of factions versus the party as a whole and the implications of the clientilism*”.

Derajat *systemness* sebuah partai dapat diukur dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni *scope* pengorganisasian, untuk melihat sejauhmana jangkauan sebuah partai terhadap akar rumput. Kemudian dari aspek tingkat kesolidan demokrasi internal partai. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan partai untuk mengelola keragaman dan perbedaan (faksionalisme) kepentingan dalam partai. Pelembagaan politik yang baik ditandai dengan kemampuan mengelola faksionalisme, sementara pelembagaan yang gagal bisa dilihat dari tumbuhnya *clientilistic party* atau *personalistic party*. Aspek lainnya untuk mengukur derajat *systemness* adalah dengan melihat pada aspek rutinisasi konstitusi partai. Serta aspek yang terakhir pelembagaan partai modern bisa diukur dari kemampuan

partai untuk mengelola tiga elemen utama yang menentukan eksistensinya (Ari Dwipayana, 2012) yakni :

- Pelembagaan Manajemen SDM Partai.  
Secara umum, agenda pengelolaan SDM mencakup pentingnya isu rekrutmen, kaderisasi dan kejelasan sistem karir dalam segenap kekhasan organisasi partai politik.
- Pelembagaan Manajemen Keuangan Partai.  
Dalam hal ini partai dituntut untuk memiliki pelembagaan keuangan; mulai dari sumber-sumber keuangan yang jelas, pengelolaan yang melembaga, transparan dan terbuka dan pengeluaran partai yang bisa dipertanggungjawabkan.
- Pelembagaan Manajemen Organisasi.  
Pengelolaan organisasi akan mencakup isu-isu pentingnya mengembangkan kepemimpinan yang demokratis dalam internal partai, perlunya mengembangkan etika politik yang akan memberikan ruh dari berbagai aturan main (*rule of the game*) dalam pengelolaan partai.

➤ ***Value infusion***

*Value Infusion* atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi atau *platform* partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai partai berhubungan dengan beberapa hal, diantaranya : *Pertama*, hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular base*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, ataupun kelompok - kelompok tertentu. *Kedua*, pengaruh *clientilism* dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota bersifat instrumental, atau lebih bersifat ideologis yang anggotanya mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap partai. (Sigit Pamungkas, 2011)

Selain itu, derajat *value infusion* suatu partai politik bisa dilihat dari beberapa aspek (Ari Dwipayana, 2012), yakni :

1) Internalisasi ideologi partai.

Hal ini menyangkut kemampuan partai untuk melakukan internalisasi nilai-nilai ideologis pada kadernya. Internalisasi memerlukan proses kaderisasi.

2) Militansi – sentimen kepartaian

Sentimen kepartaian bisa diukur dari kemampuan partai untuk mendorong pemimpin maupun anggotanya untuk memiliki identifikasi, komitmen – loyalitas pada partai dibandingkan kepentingan pribadi.

3) Pengakaran Partai (*party rooting*)

Pengakaran partai dimaksudkan agar partai-partai terikat dengan masyarakat khususnya konstituennya. Suatu partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya, dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan karena semata-mata menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau *platform* partai itu.

➤ ***Decisional autonomy***

Dimensi otonomi keputusan suatu partai politik berhubungan dengan ketergantungan terhadap aktor luar, atau dengan kata lain dimensi ini terkait dengan hubungan antara partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).

Implikasi dari adanya aktor luar, Panebianco (dikutip oleh Randall dan Svasand) menyebutkan bahwa kehadiran aktor luar atau *sponsorship* cenderung akan melemahkan kelembagaan

*“the presence of a sponsoring institution will tend to result in weak institutionalization, since the leadership’s source of legitimacy and the project of party organizational loyalties will be outside the party, vested in this external institutions”.*

Hal yang terpenting dari dimensi ini adalah : *Pertama*, apakah partai tergantung pada aktor luar tersebut atau hubungan tersebut bersifat independen. *Kedua*, apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar atau hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Selain itu, partai juga dituntut untuk otonom dari “oligarki elite”, artinya dalam membuat keputusan partai dituntut untuk otonom tanpa didikte kepentingan elite partai. Partai juga dituntut otonom dari korupsi, membebaskan diri dari praktek korupsi. Dan dalam aspek desentralisasi , partai di tingkat lokal dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa selalu diintervensi level di atasnya.

➤ ***Reification***

Reifikasi adalah bagaimana partai mampu memberikan citra ke publik yang mampu mengangkat nilai kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungannya. Selain itu juga berkaitan dengan bagaimana partai mampu menjelmakan institusinya sebagai institusi yang memiliki nilai positif dan membawa dampak positif dalam mendapatkan pilihan konstituen sebanyak-banyaknya. Reifikasi partai juga merujuk pada apakah keberadaan partai politik telah tertanam pada imajinasi publik dan sebagai faktor yang membentuk perilaku aktor politik. Reifikasi partai pada akhirnya merupakan sebuah fungsi untuk memperpanjang usia partai, sehingga partai bisa bertahan sepanjang waktu.

## 2. Samuel P. Huntington

Terkait dengan masalah kelembagaan partai politik, Huntington (2004) memberikan beberapa dimensi yang menunjukkan sebuah proses pelebagaan organisasi (termasuk partai politik), yakni :

Pertama, *Adaptability – Rigidity* (Penyesuaian diri dan kekakuan). Semakin tinggi kemampuan adaptasi sebuah organisasi, maka semakin tinggi pula derajat kelembagaannya. Sebaliknya, semakin sulit sebuah organisasi dan beradaptasi dan bersifat kaku, maka tingkat kelembagaannya pun semakin rendah. Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dapat diukur dari segi umur, dimana cara untuk mengukur usia organisasi dilakukan melalui tiga cara.

- a) *Perhitungan kronologis*. Semakin tua usia eksistensi suatu organisasi maka semakin tinggi pula derajat kelembagaannya. Semakin tua sebuah organisasi, maka semakin cenderung untuk melanjutkan keberadaannya di masa-masa yang akan datang
- b) *Usia generasi*. Selama sebuah partai masih memiliki tokoh-tokoh angkatan pertama, dan selama mereka masih mempraktekkan cara-cara atau prosedurnya, maka kemampuan adaptasinya masih diragukan. Semakin sering sebuah organisasi mampu mengatasi masalah suksesi dan menggantikan sebuah kepemimpinan dengan pemimpin yang lain, maka semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya.
- c) *Fungsi*. Organisasi yang berhasil menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi didalam lingkungannya, dan juga mengubah satu atau dua fungsi utamanya, biasanya akan jauh lebih melembaga dibanding organisasi yang tidak melakukan itu. Tolak ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat perkembangan organisasi, bukanlah dari sudut sejauhmana organisasi dapat menyesuaikan terhadap perubahan fungsi (*functional adaptability, not functional specificity*). Sebagai contoh, sebuah partai politik akan bertahan lama jika ia merubah



fungsinya dari hanya mewakili satu kelompok pemilih menjadi mewakili kelompok lain, atau dari partai oposisi menjadi partai yang memegang kekuasaan pemerintahan.

*Kedua, complexity – simplicity* (kompleksitas dan kesederhanaan). Semakin kompleks sebuah organisasi, semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya. Kompleksitas sebuah organisasi dapat terkait dengan penambahan jumlah sub unit organisasi, secara hirarki dan fungsi, dan diferensiasi berbagai tipe sub unit organisasi yang terpisah.

*Ketiga, autonomy – subordination* (otonomi dan subordinasi). Aspek ini mengukur bagaimana sebuah organisasi politik dan prosedur tidak tergantung pada organisasi sosial lain serta metode perilaku yang lain. Dalam konteks otonomi, pelembagaan organisasi politik berarti pengembangan organisasi politik dan prosedur yang tidak secara sederhana merupakan ekspresi dari kepentingan kelompok sosial tertentu. Adanya otonomi menjadi sarana untuk mencapai perpaduan dan meratakan jalan bagi organisasi untuk mengembangkan suatu semangat serta pola yang menjadi ciri khas perilakunya. Otonomi juga mencegah kekuatan-kekuatan eksternal organisasi yang akan mengganggu organisasi, walaupun sudah tentu otonomi itu sendiri tidak memberikan perlindungan terhadap gangguan yang timbul dari sumber intern sendiri. Dalam sistem politik dengan tingkat kelembagaan yang tinggi, posisi kepemimpinan terpenting secara normal hanya bisa diraih oleh mereka yang telah melayani magang dalam posisi yang kurang penting. Kompleksitas sebuah sistem politik berkontribusi pada otonominya dengan menyediakan berbagai jenis organisasi dan posisi dimana seorang individu disiapkan untuk jabatan tertinggi.

*Kelima, coherence-disunity* (kesatuan dan perpecahan). Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat kelembagaannya. Dan sebaliknya, semakin terpecah suatu organisasi, semakin rendah pula tingkat kelembagaannya. Adanya konsensus menjadi prasyarat bagi organisasi sosial apapun. Sebuah organisasi yang efektif memerlukan minimal konsensus substantif pada batas-batas fungsi kelompok dan prosedur

yang dapat digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan atau perselisihan yang mungkin timbul. Konsensus harus mencakup mereka yang aktif dalam sistem, yang diluar dianggap tidak perlu. Pesatnya penambahan anggota organisasi atau partisipan dan dalam jumlah yang cukup besar cenderung melemahkan persatuan dan kesatuan organisasi.

### 3. Basedau dan Stroh

Konseptualisasi Basedau dan Stroh mengenai pelebagaan partai politik merupakan modifikasi dari konsep pelebagaan partai politik Randall dan Svasand. Basedau dan Stroh menyebutkan empat aspek pelebagaan partai politik, meliputi pengakaran di masyarakat, aspek otonomi, organisasi, dan koherensi. Pengakaran partai di masyarakat menunjuk pada sejauhmana partai politik independen dari individu dari dalam dan dari luar partai. Dimensi organisasi menunjuk pada sejauhmana apparatus organisasi partai hadir konsisten disemua level administrasi dan bertindak dalam kerangka kepentingan partai. Dan koherensi menunjuk pada sejauhmana perilaku partai sebagai sebuah kesatuan organisasi dan sejauhmana tingkat tertentu toleransi partai atas perselisihan dalam partai. Berikut adalah tabel dimensi pelebagaan partai menurut Basedau

Tabel 4

Dimensi Pelebagaan Partai Politik Versi Basedau dan Stroh

Dimensi Pelebagaan	Indikator
Pengakaran di masyarakat : Partai memiliki akar yang stabil dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relativitas umur partai terhadap kemerdekaan</li><li>• Relativitas umur partai terhadap permulaan periode multipartai</li><li>• Perubahan dukungan elektoral dalam Pemilu terakhir atau dua Pemilu terakhir.</li><li>• Hubungan dengan organisasi</li></ul>

<p>Otonomi : Sekalipun berakar dalam masyarakat, partai relatif independen partai relatif independen dari individu didalam dan kelompok dari luar partai</p>	<p>masyarakat sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pergantian kepemimpinan partai</li> <li>• Pergeseran dukungan elektoral setelah pergantian kepemimpinan partai</li> <li>• Otonomi dari keputusan individu dan kelompok</li> <li>• Apresiasi rakyat atas partai tertentu</li> </ul>	<p>dan Stro h</p>
<p>Organisasi : Aparatus organisasi hadir konsisten di semua level administrasi dan bertindak dalam kerangka kepentingan partai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekuatan Anggota</li> <li>• Kongres partai teratur</li> <li>• Sumberdaya personal dan material</li> <li>• Kehadiran organisasional di seluruh negara, aktivitas tidak sekedar kampanye pemilihan</li> </ul>	

Sumber : Basedau dan Stroh (Dikutip oleh Sigit Pamungkas, 2011)

### ***Electoral Volatility dan Pelembagaan Partai Politik di Indonesia***

Berdasarkan dua pemaparan diatas mengenai *electoral volatility* dan konsep-konsep pelembagaan partai politik, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa terdapat suatu relasi antara *electoral volatility* dengan pelembagaan partai politik, lemahnya pelembagaan partai politik mengakibatkan tingginya angka *electoral volatility*. Dari konsep-konsep kelembagaan partai politik terdapat beberapa dimensi yang dianggap paling dominan dalam mengakibatkan tingginya angka *electoral volatility*.

*Electoral volatility* berkaitan dengan hubungan antara partai dan konstituen. Tidak adanya perasaan kedekatan konstituen dengan partai politik mengakibatkan tidak adanya loyalitas dari konstituen terhadap partai politik. Dari dimensi kelembagaan, hal ini menunjukkan lemahnya pelembagaan partai politik dalam derajat *systemness*, *value infusion* dan reifikasi, terutama dalam masalah pengakaran di masyarakat dan masalah ideology serta platform partai yang kemudian mendorong terbentuknya *party ID*. Namun kesemuanya ini juga tidak lepas dari faktor bagaimana partai politik tumbuh dan berkembang di Indonesia.

## Sejarah Perkembangan Partai Politik Di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia sudah dimulai sejak masa pra kemerdekaan. Kehadiran partai politik masa itu kemudian menjadi alat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini berdiri Boedi Utomo dan Syarikat Islam (SI) yang semula berorientasi non politik namun kemudian berkembang menumbuhkan partai politik. Sementara itu Indische Partij menjadi partai pertama yang berdiri di Indonesia.

Perkembangan politik masa setelah kemerdekaan ditandai dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945. Maklumat tersebut berisi bahwa “Pertama, Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat; kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada Bulan Januari 1946 ” (Mahfud MD, dikutip oleh Sigit Pamungkas, 2011).

Pada masa ini, pengaruh ikatan primordial seperti, agama, suku, dan kedaerahan tampak jelas dalam pengorganisasian partai politik. Dukungan partai politik juga cenderung mengikuti perbedaan sosial keagamaan, sebagaimana disebutkan oleh Clifford Geertz bahwa kelompok Islam abangan dan priyayi merupakan pendukung partai-partai politik sekuler, sedangkan kelompok Islam santri merupakan pendukung partai-partai politik yang bersifat keagamaan, terutama partai politik Islam. Namun Herbert Feith menilai kategorisasi tiga aliran tersebut masih bersifat heterogen sehingga membuatnya menjadi lima aliran utama. Lima aliran yang muncul pada masa itu adalah :

- 1) Komunis (*communism*); direpresentasikan oleh PKI
- 2) Nasionalisme Radikal (*Radical Nationalism*); direpresentasikan oleh PNI
- 3) Sosialis Demokrat (*democratic socialism*); direpresentasikan oleh PSI
- 4) Islam; direpresentasikan oleh Masjumi dan NU

- 5) Tradisional Jawa (*Javanese traditionalism*); Dalam hal ini Feith menyebutkan munculnya figur-figur seperti Soekarno, Sjahrir, Natsir dan Aidit.

Namun kemudian partai-partai politik pada waktu itu mampu menjatuhkan kabinet pemerintahan yang ditandai dengan pergantian kabinet yang sangat cepat. Sampai Tahun 1947 saja tercatat Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan kabinet. Pada Tahun 1959, Indonesia kemudian memasuki era kelam demokrasi, yakni memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno, partai-partai politik tidak berfungsi, bahkan jumlahnya dikurangi, dari 28 partai politik hanya tinggal 10 partai politik. Namun demokrasi terpimpin tidak berlangsung lama, insiden G 30 S/ PKI menjatuhkan Soekarno dari kepresidenan.

Pasca Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), Indonesia kemudian memasuki masa Orde Baru. Pada Masa ini pemerintah melakukan berbagai kebijakan politik yang semakin mengekang keberadaan partai politik. Pemerintah menganggap keberadaan partai politik hanya mengganggu stabilitas politik seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Sehingga kemudian pemerintah melakukan kebijakan fusi atau penyederhanaan jumlah partai politik. Dengan adanya kebijakan fusi tersebut, jumlah partai politik kemudian disederhanakan menjadi tiga partai, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang merupakan penggabungan dari partai-partai Islam, kemudian PDI (Partai Demokrasi Indonesia) merupakan penggabungan dari partai-partai nasionalis dan Kristen, serta ditambah Golkar (Golongan Karya). Selain melakukan kebijakan fusi, pemerintah juga menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik, termasuk juga organisasi massa.

Jatuhnya pemerintahan Soeharto telah membuka kesempatan bagi lahirnya partai-partai baru. Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai. Banyaknya jumlah partai saat itu dapat dikatakan mengulang masa awal kemerdekaan sampai dengan Tahun 1950-an, dimana jumlah partai begitu banyak. Banyaknya jumlah partai politik tersebut merupakan cerminan dari heterogenya struktur masyarakat Indonesia. Namun banyaknya partai tersebut mendapat kritikan dari publik,

keberadaan partai politik tidak berbanding lurus dengan fungsi yang diembannya. Partai politik cenderung lebih terfokus pada perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan sekelompok elit dibandingkan dengan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Akibatnya timbul gap antara partai politik dengan rakyat (konstituen) yang berujung pada penurunan partisipasi politik dan tingginya angka *electoral volatility*.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, derajat *systemness*, *value infusion* dan reifikasi, terutama dalam masalah pengakaran di masyarakat dan masalah ideology serta platform partai yang kemudian mendorong terbentuknya *party ID* merupakan sumber terjadinya *electoral volatility*.

- **Derajat Systemness**

Dalam dimensi ini, kita bisa melihat bahwa banyak partai politik yang masih mengalami kegagalan dalam pelebagaan partai. Aktivitas partai politik banyak yang belum mengena sampai akar rumput. Partai politik lebih banyak terlihat dalam aktivitas perebutan kekuasaan, walaupun partai politik ke akar rumput kebanyakan masih sebatas mencari dukungan untuk memperoleh suara.

Disisi lain, tingkat kesolidan internal partai politik terutama dalam mengelola faksionalisme dinilai lemah. Partai-partai politik cenderung gagal dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam internal partai. Hingga akhirnya faksi yang berkonflik tersebut kemudian keluar dari partai dan membentuk partai baru. Hal ini seperti yang terjadi pada PPP, terjadinya konflik internal partai yang tidak dapat diselesaikan kemudian mengakibatkan faksi yang berselisih ini keluar dari partai dan membentuk PPP reformasi yang kemudian berganti nama menjadi PBR (Partai Bintang Reformasi). Selain itu juga ada PDI Perjuangan yang merupakan pecahan dari PDI, PMB (Partai Matahari Bangsa) yang merupakan pecahan dari PAN, dan yang terakhir adalah perpecahan di tubuh PKB yang melahirkan partai-partai baru seperti PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), dan yang terakhir adalah PKBIB (Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru).

Dengan membandingkan hasil Pemilu dengan konflik yang terjadi di internal partai, saya menarik kesimpulan bahwa konflik internal partai yang tidak dapat terselesaikan mempengaruhi perilaku memilih masyarakat. Sebagai contoh, PDIP yang merupakan pecahan dari PDI berhasil mengambil dukungan suara dan menjadi partai pemenang Pemilu pada Tahun 1999 dengan memperoleh 33,74% suara, sementara PDI yang merupakan partai lama hanya memperoleh 0,33% suara. Namun tidak selamanya partai baru dapat mengambil konstituen dari partai lama, misalnya yang terjadi pada PPP dan PBR, PPP Pada Pemilu 1999 memperoleh 10,71% suara, dan pada Pemilu Tahun 2004, ketika muncul PBR sebagai pecahan dari PPP, PPP memperoleh 8,15% suara dan PBR 2,44% suara. Jika kita jumlahkan hasil tersebut maka terdapat selisih angka perolehan suara dari PPP sebelumnya. Demikian halnya dengan PAN yang pada Tahun 1999 memperoleh 7,12% suara, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2004 menjadi 6,44% suara, dan pada Pemilu Tahun 2009 ketika terjadi perpecahan dan muncul PMB, jumlah perolehan suara kembali turun hanya menjadi 6,03% suara, dan PMB memperoleh 0,4% suara. Disini saya melihat bahwa ketika suatu partai mengalami konflik dan perpecahan, suara konstituen kemudian menjadi terpecah dan sebagian lagi mengalihkan dukungannya kepada partai lain. Disinilah kita bisa melihat bahwa sumber terjadinya *electoral volatility* salah satunya disebabkan oleh lemahnya pelembagaan partai, terutama dalam derajat *systemness*. Seperti yang dikatakan Morlino (1995) bahwa stabilitas *electoral* melibatkan stabilitas hubungan antara partai dengan konstituen, serta stabilitas didalam partai itu sendiri.

- **Value Infusion dan Pentingnya Ideologi**

*Value infusion* terkait dengan kebijakan dan tindakan partai politik berdasarkan pada ideologi atau *platform* partai. Lapisan sosial atau golongan masyarakat memberi dukungan kepada suatu partai karena mengidentifikasi orientasi politiknya dengan ideology atau *platform* partai itu (Ramlan Surbakti, dikutip oleh Ari Dwipayana, 2012).

Mc Closky (dikutip oleh Firmanzah, 2011) mendefinisikan ideology politik sebagai ‘*system of belief that are elaborate, integrated, and coherent that justify the exercise of power, explain and judge historical events, identify political right and wrong, set forth the interconnection (causal and moral) between politics and the sphere of activity*. Menurut definisi ini, ideology politik adalah kesatuan sistem yang terintegrasi dan memiliki konsistensi untuk memberikan landasan logis bagi penggunaan kekuasaan. Ideologi politik selalu hadir dalam setiap program politik, langsung ataupun tidak langsung dan sadar ataupun tidak sadar serta menjadi ciri khas setiap gerakan organisasi politik.

Partai politik tanpa ideology bak sayur tanpa garam (Firmanzah, 2011), namun inilah yang terjadi di Indonesia. Semangat pragmatisme membuat dunia politik semakin jauh dari wacana ideologi. Lebih lanjut lagi, semakin tingginya tekanan persaingan politik membuat para politikus lebih berorientasi pada strategi untuk memenangkan Pemilu semata, dan partai politik yang ada saat ini merupakan tipe *catch all party*.

Sesungguhnya ideologi politik sangat membantu para pemilih dalam menentukan pilihan mereka diantara partai-partai. Ideology menjadi daya tarik bagi pemilih untuk menentukan partai mana yang paling sesuai dengan cara pandang yang mereka yakini (*ideology identification*).

Partai-partai yang ada pada saat ini umumnya masih berpaku pada ideology yang abstrak dan belum diimplementasikan dalam wujud konkret sebagai *platform* partai, yakni berupa program-program dan kebijakan yang riil. Kalaupun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan masih bersifat umum. Oleh karena ideologi belum dijabarkan dalam bentuk *platform* yang jelas, maka perbedaan diantara partai politik baru tampak secara simbolik, sehingga menimbulkan kesulitan bagi konstituen untuk membedakan satu partai dengan partai lainnya. Dampak lainnya adalah konstituen juga sulit untuk membandingkan sikap partai politik terhadap berbagai isu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kaitannya dengan *electoral volatility*, ideologi politik merupakan sebuah “pengikat sosial” yang menjembatani pemilih dengan partai politik.



Dukungan yang besar terhadap suatu partai politik rasanya sulit diperoleh tanpa ideologi yang jelas dan dikomunikasikan kepada pemilih. *Ideology identification* akan mendorong munculnya *party identification (Party ID)*. *Party ID* diyakini mempunyai pengaruh yang luas terhadap berbagai sikap politik dan perilaku politik seperti partisipasi dalam pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden, dan lain-lain. *Party ID* dapat membantu menjaga stabilitas dan kontinuitas dukungan kepada partai politik. Kalaupun ada *swing* ataupun perolehan suara, maka jumlahnya tidak akan terlalu besar dan pada akhirnya akan membuat sistem kepartaian tetap stabil. Dan jika kita mengaitkan ideologi partai politik dan *party ID* di Indonesia dengan fenomena tingginya tingkat *electoral volatility* ini memang sangat berkaitan.

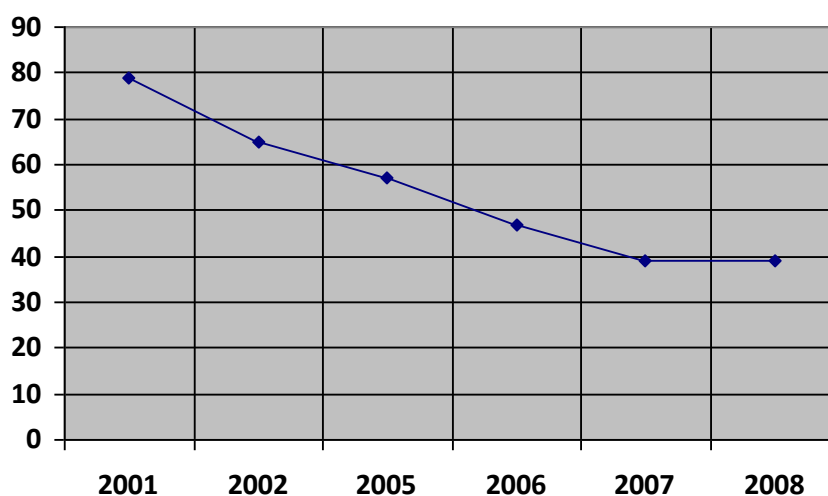
- **Reifikasi**

Reifikasi partai terkait erat dengan citra partai yang akan mempengaruhi dukungan konstituen terhadap partai tersebut. Dengan kata lain, reifikasi ini juga terkait dengan legitimasi partai. Legitimasi disini menyangkut seberapa besar partai mendapatkan kepercayaan masyarakat yang didasarkan pada penilaian masyarakat atas kinerja partai. Penilaian ini biasanya didasarkan pada apakah program yang dilakukan sudah sesuai dengan ideologi atau program-program yang dibutuhkan dan dijanjikan kepada masyarakat.

Buruknya citra partai politik di Indonesia yang dianggap korup, pragmatis, dan lain sebagainya telah mendorong ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Hal ini kemudian berakibat pada turunnya partisipasi dan identifikasi terhadap partai politik (*party ID*). Tidak adanya identifikasi diri seseorang terhadap partai politik mengakibatkan tidak adanya loyalitas terhadap partai politik. Dan kemungkinan untuk mengalihkan pilihan politik pada Pemilu selanjutnya menjadi terbuka lebar.

Berdasarkan hasil survey LSI, penurunan identitas partai ini cukup konsisten dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang juga terus menurun. Hal ini seperti ditunjukkan dalam grafik dibawah.

Grafik. 1  
Kepercayaan Pada Partai Politik (%)



Sumber : Saiful Mujani, dkk “Kuasa Rakyat”, 2012

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita simpulkan beberapa hal : *pertama*, dalam demokrasi, lembaga partai politik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan menjadi pilar dari demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Namun dalam demokratisasi, sebuah proses demokrasi yang masih mencari bentuk, keberadaan partai politik tidak hanya penting untuk kelangsungan demokrasi, tetapi juga demokrasi menjadi sesuatu hal yang penting bagi pengembangan partai politik itu sendiri. *Kedua*, pasca reformasi, perkembangan partai politik di Indonesia mengalami berbagai kendala, partai politik dianggap tidak atau kurang mampu menjalankan fungsinya, terutama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik. Selain itu, partai politik juga dianggap korup sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. *Ketiga*, permasalahan lain yang dihadapi oleh partai politik sebagai akibat dari jauhnya hubungan partai politik dan masyarakat (konstituen) adalah tingginya angka *electoral volatility*. Berbeda dengan Pemilu pada masa Orde Baru yang selalu dimenangkan oleh Golkar, pada Pemilu pasca reformasi selalu

menghasilkan partai pemenang yang berbeda. *Keempat*, terdapat suatu relasi antara *electoral volatility* dengan pelebagaan partai politik, lemahnya pelebagaan partai politik mengakibatkan tingginya angka *electoral volatility*. *Electoral volatility* berkaitan dengan hubungan antara partai dan konstituen. Tidak adanya perasaan kedekatan konstituen dengan partai politik mengakibatkan tidak adanya loyalitas dari konstituen terhadap partai politik. Dari dimensi kelembagaan, hal ini menunjukkan lemahnya pelebagaan partai politik dalam derajat *systemness*, *value infusion* dan reifikasi, terutama dalam masalah pengakaran di masyarakat dan masalah ideology serta platform partai yang kemudian mendorong terbentuknya *party ID*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Duverger, Maurice. 1959. *Political Parties: Their Institutions and Activity In The Modern State*. London : Methuen. Co. Ltd
- Dwipayana, AAGN Ari. 2012. *Memperkuat Pelembagaan Partai Politik*. Makalah dalam seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pusaka Obor Indonesia
- Hicken, Allen. 2006 *Stuck In The Mud : Parties and Party Systems In Democratic Southeast Asia*. Taiwan Journal of Democracy 2:2, 23-46
- Huntington, Samuel P. 1968. *Politics Order In Changing Society*. New Haven & London : Yale University Press
- Kenneth M. Roberts dan Erik Wibbels. *Party Systems and Electoral Volatility In Latin America : A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations*. The American Political Science Review, Vol. 93, No. 3. Pp 575-590
- Mainwaring, scott. 1998. *Party Systems In The Third Wave*. Journal of Democracy 9.3, pp 67-81
- Markoff, John, *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik : Teori dan Praktek Di Indonesia*. Yogyakarta : Institute of Democracy and Welfarism
- Peter Mair, dkk. 2004. *Political Parties and Electoral Change : Party Responses To Electoral Markets*. London : SAGE Publications Ltd
- Richard Gunther, dkk. 1995. *The Politics of Democratic Consolidation : Southern Europe in Comparison Perspective*. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press
- Romli, Lili. 2012. *Pelembagaan Partai Politik Era Reformasi*. Makalah dalam seminar “Pelembagaan Partai Politik”, diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.

- Saiful Mujani, dkk. 2012. *Kuasa Rakyat*. Bandung : Mizan
- Scott Mainwaring and Mariano Torcal. 2005. Scott Mainwaring and Mariano Torcal. 2005. *Party Systems Institutionalization and Party System Theory After The Third Wave Of Democratization*. The Hellen Kelog Institute For International Studies. Working Paper #319
- Ufen, Andreas. 2007. *Political Party and Party System Institutionalisation In Southeast Asia : A Comparison of Indonesia, The Philippines, and Thailand*. GIGA Working Papers No. 44
- Vicky Randall dan Lars Svasand. 2002. *Party Institutionalization In New Democracies*. Sage Publications. Vol 8 No.1, pp 5-29
- Warsito Ellwein & Hari Subagyo. 2011. *KonstituenPilar Utama Partai Politik, Modul Pendidikan Politik : Manajemen Konstituen*. Jakarta : Friedrich Naumman Stiftung Fuer Die Freiheit